



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Jl. Bhayangkara Kantor Bersama
panwaskabtanjabtimur@gmail.com

Kel. Talang Babat Muara Sabak
Kode Pos : 36761

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR ~~067~~/HK.01.01/K/JA-08/11/2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 031.1/HK.01.01/K/JA-08/01/2023 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Sentra Gakkumdu;
 - b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Anggota Gakkumdu Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 292);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 411);
12. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 277/PP.00.00/K1/08/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Memperhatikan : 1. Surat Perintah Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor :66 /HK.01.01/K/JA-08/11/2023 Tanggal 01 November 2022;

2. Surat Perintah dari Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur nomor : PRINT-559/L.5.18/Cp.2/09/2023 tanggal 01 September 2023.

3. Surat Perintah Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur Nomor : SPRIN/1144/X/OPS.1.1.1./2023 tanggal 31 Oktober 2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Membentuk Tim Sentra Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung timur Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan susunan tim sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;

KEDUA : Menunjuk Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta jajaran di masing-masing instansi sebagai Penasehat, Pembina, Koordinator, dan Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

KETIGA : Struktur Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana Diktum KEDUA, mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan rincian sebagai berikut :

- a. Penasehat
 1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan
 2. Mengawasi pelaksanaan penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan umum di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- b. Pembina
 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum;
 2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur kepada Penasehat.

c. Koordinator

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan dalam Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melaksanakan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum;
3. Memberikan arahan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
4. Melaporkan hasil rapat pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur kepada Pembina.

d. Anggota

1. Melaksanakan tugas sesuai arahan Koordinator dalam penanganan tindak pidana Pemilihan Umum;
2. Melaksanakan tugas administrasi pada kegiatan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan
3. Melaporkan hasil tugas yang telah dilaksanakan kepada Koordinator.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, diberikan honorarium yang akan dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KELIMA : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2023;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tahapan Pemilu serentak tahun 2024 berakhir.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 02 November 2023

KETUA,

TARMUZI



Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jambi
2. Yth. Ketua Sentra Gakkumdu Provinsi Jambi
3. Yth. Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Tanjung Jabung Timur
4. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tanjung Jabung Timur
5. Yth. Yang bersangkutan
6. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG
JABUNG TIMUR
Nomor : 067 /HK.01.01/K/JA-08/11/2023
Tanggal : 02 November 2023

SUSUNAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	TARMUZI, S.Pd.I	Ketua Bawaslu	Penasihat
2	HERI SUPRIAWAN, S.I.K., M.H	Kapolres	Penasihat
3	BAMBANG SUPRIYANTO, S.H., M.H	Kajari	Penasihat
4	NURDIN, S.E	Anggota Bawaslu	Pembina
5	GOKMA ULIA TE SITOMPUL, S.H., S.I.K	Wakil Kapolres	Pembina
6	FUSTHATHUL AMUL HUZNI, S.H	Kasi Pidum	Pembina
7	SYAKUR RAHMAN, S.Pd	Anggota Bawaslu	Koordinator
8	RONI MELANTIKA, S.H	Plt. Kasat Reskrim Polres	Koordinator
9	ANGGI ANGGALA TRIWIRA, S.H., M.H	Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	Koordinator
Tim Pelaksana :			
1	DEDI SAPUTRA, S.E	Kepala Sekretriati Bawaslu	Anggota
2	YANDRA ASRIL, S.H	Kasubbag Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
3	NUNUNG SUCIATI, S.IP	Staf Bawaslu	Anggota
4	MUHAMMAD SYAKUR, S.H., M.H	Staf Bawaslu	Anggota
5	YETTY KOMARIAH, S.E	Staf Bawaslu	Anggota
6	HOT MARTUA SINAGA, S.E	Staf Bawaslu	Anggota
7	CANDRA, S.Pd	Staf Bawaslu	Anggota
8	ARIS PADLY, S.H	Kanit Tipidkor Polres	Anggota
9	RIKY R SIAHAAN, S.H	PS. Kanit PPA Polres	Anggota
10	MIKAEL H SINAGA	BA Satreskrim Polres	Anggota
11	HAFIEZD, S.H., M.H	Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
12	NURUL AFIFAH ANA, S.H	Jaksa Fungsional	Anggota
13	FIKRY FACHLEVI, S.H	Jaksa Fungsional	Anggota

KETUA,

TARMUZI
